

## Pengaruh Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Selva Temalagi<sup>1</sup>,  
Korneles Sairatu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan data melalui kuesioner. Adapun jenis data dari sumber data dari penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil sebaran kuesioner sebanyak 42 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

**Kata Kunci: Pengetahuan Peraturan, Pengadaan Barang dan Jasa**

### ABSTRAC

*This study aims to examine the effect of knowledge of regulations and the bureaucratic environment on budget absorption related to the procurement of goods/services in the government of the Aru Islands Regency. This type of research used is descriptive quantitative. Data collection techniques through questionnaires. The type of data from the data source of this study is primary data, namely data obtained directly from the results of the distribution of questionnaires as many as 42 respondents who occupy positions in fields related to the budget within the scope of the Government of the Aru Islands Regency.*

*The results of the study using multiple linear regression showed that knowledge of regulations and the bureaucratic environment had a significant influence on budget absorption related to the procurement of goods/services.*

**Keywords: Knowledge of Regulations, Procurement of Goods and Services**

---

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email: selva\_temalagi@yahoo.com

<sup>2</sup> PSDKU, Universitas Pattimura, email: neles\_sairatu@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 (2), APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dalam anggaran belanja, terdapat proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran setiap tahun. Menurut IPW (2011), lebih dari 30-40 persen anggaran belanja dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa.

Masalah Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang / jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah.

Permasalahan lain yang terjadi pada penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa yaitu adanya kelemahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian direvisi menjadi Perpres No. 70/2012 dengan tujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan menyederhanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun, penyerapan anggaran masih rendah dan distribusi penyerapan anggaran yang tidak proporsional sepanjang tahun. Oleh karena itu, faktor-faktor apa saja yang terindikasi mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengetahuan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Love et al. 2008). Pengetahuan terkait peraturan yang berlaku dapat menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang/jasa (Al Weshah 2013) dan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa yang kurang akan menghambat penyerapan anggaran (Kuswoyo 2011). Oleh karena itu, pengetahuan peraturan akan sangat memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Birokrasi merupakan aturan pejabat (*rule by officials*) (Albrow 1970 dalam Jackson 1982), sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan dibuat untuk kesuksesan dan efisien satuan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Eisentandt, 1959). Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun, jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi.

Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Terdapat beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya masih rendah dan mendapat raport merah yaitu dengan serapan anggaran yang masih dibawah 90%. (LKPD, 2019). Persentase mengenai serapan anggaran yang rendah ini tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah.

Beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah ini seperti adanya anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, terbukti dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 80%. Dengan persentase tersebut maka timbul pertanyaan, apakah

persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 80% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolak ukurnya. Maka dari itu jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun di awal, apakah telah sesuai target atau tidak. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah disebabkan juga oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah. (btkp.go.id)

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Dian Juliany (2014) tentang Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dian Juliany (2014) adalah jumlah variabel independen yang digunakan. Pada penelitian Dian Juliany (2014) menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengetahuan peraturan, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi dan variabel dependen yaitu penyerapan anggaran terkait pengadaa barang/jasa, tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi. Dasar pikir penulis hanya menggunakan dua variabel ini adalah penulis ingin mengukur tingkat pengetahuan peraturan yang dimiliki oleh pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan barang/jasa serta pengaruh lingkungan birokrasi SKPD terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa baik dalam lingkup SKPD maupun secara menyeluruh dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali faktor-faktor konsektual yaitu pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru)*".

Rumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah Pengetahuan Peraturan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru?, 2) Apakah Lingkungan Birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru?

Tujuan Penelitian ini untuk menguji: 1) Pengaruh Pengetahuan Peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru, 2) Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru.

Adapun kegunaan manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis tentang pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggran terkait barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 2) Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Aru tentang pengaruh pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggran terkait barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang beberapa variabel berkaitan dengan judul skripsi ini, adalah sebagai berikut:

### **Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pradata, Bramastyasa Gilang (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi Dan Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa.	Temuan menunjukkan perencanaan anggaran, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh positif, akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
2	Dian Juliany (2014)	Pengaruh Faktor- faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/ jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dibutuhkan pengetahuan peraturan pegawai pengadaan barang/jasa, perbaikan yang berkesinambungan, peningkatan komitmen dari kepala SKPD, dan lingkungan organisasi publik yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa.
3	Dian Juliani, Dr. Mahfud Sholihin, M.Acc. (2014)	Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengetahuan Peraturan, Lingkungan Birokrasi, Dan Pengawasan Keluaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa	Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen, pengetahuan regulasi, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang / jasa.
4	Elypaz Donald Rerung (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Selatan. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Selatan.
5	Ayuti F. Aldita, Said Muniruddin (2018)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sdm, Pemahaman Atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Skpd Kota Langsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan anggaran, Kualitas SDM, Pemahaman atas sistem akuntansi, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</li> <li>2. Perencanaan anggaran mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</li> <li>3. Kualitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</li> </ol>

			<p>4. Pemahaman atas Sistem Akuntansi mempengaruhi tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</p> <p>5. Lingkungan Birokrasi mempengaruhi tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</p> <p>6. Komitmen Organisasi mempengaruhi tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan mengenai pengaruh pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa (pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru). Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 42 orang pegawai. Berikut tabel karakteristik responden.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Pria	34	81,0%
Wanita	8	19,0%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pendidikan</b>		
S1	34	81,0%
S2	3	7,1%
S3	0	0,0%
Lainnya	5	11,9%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lama Bekerja</b>		
< 5 tahun	0	0,0%
5 - 10 tahun	1	2,4%
> 10 tahun	41	97,6%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lama Menjabat</b>		
< 5 tahun	21	50,0%
5 - 10 tahun	19	45,2%
> 10 tahun	2	4,8%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>

<b>Sertifikat</b>		
Memiliki	28	66,7%
Tidak Memiliki	14	33,3%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
<b>Jabatan</b>		
PPK	11	26,2%
PPTK	10	23,8%
PP-SPM	10	23,8%
Bendahara Pengeluaran	11	26,2%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>

Sumber : Hasil olah data, 2021

Tabel 1 dilihat dari jenis kelamin responden, pria 34 orang (81,0%) dan wanita 8 orang (19,0%), artinya sebagian besar responden adalah pria. Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terdapat 34 orang (81,0%) tamatan S1, 3 orang (7,1%) tamatan S2 dan 5 orang (11,9%) tamatan Diploma (D3). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sudah baik. Dilihat dari lamanya responden bekerja, kurang dari 5 tahun tidak ada, 5-10 tahun 1 orang (2,4%) dan lebih dari 10 tahun 41 orang (97,6%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sehingga menunjukkan bahwa responden sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan cukup baik dalam bidang penganggaran. Berdasarkan tingkat jabatan responden mayoritas adalah PPK dan Bendahara Pengeluaran yang masing-masing sebanyak 11 orang atau 26,2%

### Statistik Deskriptif Variabel

Variabel Penyerapan Anggaran (Y) berjumlah 9 pernyataan dan Hasil Rekapitulasi jawaban Penyerapan Anggaran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2.**

### Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Penyerapan Anggaran

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-Ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
P1	0	0	0	0	0	0	24	57,1	18	42,9
P2	14	33,3	20	47,6	8	19,0	0	0	0	0
P3	0	0	0	0	3	7,1	13	31,0	26	61,9
P4	24	57,1	18	42,9	0	0	0	0	0	0
P5	0	0	0	0	0	0	23	54,8	19	45,2
P6	0	0	0	0	0	0	17	40,5	25	59,5
P7	0	0	0	0	1	2,4	15	35,7	26	61,9
P8	23	54,8	15	35,7	4	9,5	0	0	0	0
P9	23	54,8	15	35,7	4	9,5	0	0	0	0

Sumber : Hasil olah data, 2021

Berdasarkan tabel 2 pernyataan pertama hingga pernyataan kesembilan, kesimpulan yang dapat diambil dari indikator Penyerapan Anggaran dimana responden mendominasi menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan yaitu dalam melakukan pengadaan barang/jasa diperlukan proses perencanaan yang sesuai dengan skala prioritas dan target yang diinginkan dicapai serta harus

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Hasil rekapitulasi jawaban pengetahuan peraturan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.**

**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pengetahuan Peraturan**

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-Ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	13	31,0	19	45,2	6	14,3	4	9,5	0	0,0
P2	0	0,0	0	0,0	3	7,1	30	71,4	9	21,4
P3	1	2,4	8	19,0	9	21,4	11	26,2	13	31,0
P4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	27	64,3	15	35,7
P5	16	38,1	26	61,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
P6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	40,5	25	59,5

Sumber: Hasil olah data, 2021

Berdasarkan tabel 3 pernyataan pertama hingga pernyataan keenam, kesimpulan yang dapat diambil dari indikator Pengetahuan Peraturan dimana jawaban responden mendominasi setuju atas pernyataan yang diberikan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tingkat pengetahuan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan agar dapat terlaksana dengan baik.

Hasil rekapitulasi jawaban Lingkungan Birokrasi dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.**

**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Lingkungan Birokrasi**

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-Ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	10	23,8	28	66,7	2	4,8	2	4,8	0	0,0
P2	20	47,6	20	47,6	2	4,8	0	0,0	0	0,0
P3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	27	64,3	15	35,7
P4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	24	57,1	18	42,9
P5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	61,9	16	38,1
P6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	61,9	16	38,1
P7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	40,5	25	59,5
P8	0	0,0	9	21,4	2	4,8	28	66,7	3	7,1
P9	0	0,0	0	0,0	3	7,1	31	73,8	8	19,0

Sumber: Hasil olah data, 2021

Berdasarkan tabel 4 kesimpulan yang dapat diambil dari setiap jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel lingkungan birokrasi adalah prosedur pengadaan barang/jasa membuat system pengadaan menjadi lebih tertata rapi dan baik. Selain itu adanya koordinasi yang baik antara bawahan dan pimpinan serta ketersediaan pegawai dalam satuan kerja guna pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**Uji validitas**

Uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau valid tidaknya item pertanyaan pada variabel Penyerapan Anggaran, Pengetahuan Peraturan dan Lingkungan Birokrasi. Dengan menggunakan responden yang diteliti sebanyak 42 orang, item pertanyaan akan terbukti valid jika nilai dari  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Nilai  $r$  *Corrected Item-Total Correlation*, sedangkan nilai  $r_{hitung}$  dapat dilihat

pada kolom tabel dari degree of freedom (df) = n-2, maka df =40 dan tingkat kepercayaan  $\alpha =0,05$  diperoleh sebesar 0,2573.

Hasil uji validitas instrumen penelitian, seperti ditabelkan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung}$  semua instrumen penelitian lebih besar dari (0,2573). Koefisien korelasi berada pada rentang 0,263 – 0,586 dan lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,2573). Semakin tinggi koefisien korelasi yang diperoleh, semakin tinggi tingkat validitas butir pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas, semua butir instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan valid.

**Tabel. 5 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Butir Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keputusan
1	Penyerapan Anggaran	1	0,370	0,2573	Valid
		2	0,357	0,2573	Valid
		3	0,541	0,2573	Valid
		4	0,427	0,2573	Valid
		5	0,282	0,2573	Valid
		6	0,402	0,2573	Valid
		7	0,509	0,2573	Valid
		8	0,340	0,2573	Valid
		9	0,263	0,2573	Valid
2	Pengetahuan Peraturan	1	0,528	0,2573	Valid
		2	0,279	0,2573	Valid
		3	0,586	0,2573	Valid
		4	0,375	0,2573	Valid
		5	0,365	0,2573	Valid
		6	0,284	0,2573	Valid
3	Lingkungan Birokrasi	1	0,289	0,2573	Valid
		2	0,518	0,2573	Valid
		3	0,277	0,2573	Valid
		4	0,317	0,2573	Valid
		5	0,539	0,2573	Valid
		6	0,265	0,2573	Valid
		7	0,385	0,2573	Valid
		8	0,545	0,2573	Valid
		9	0,323	0,2573	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2021

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai  $r_{hitung}$  dari masing-masing pernyataan kuesioner adalah lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Jadi, dapat disimpulkan semua pertanyaan pada variabel independen, dan variabel dependen adalah valid bahwa nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ .

### **Uji Reliabilitas**

Suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2016), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.673	3

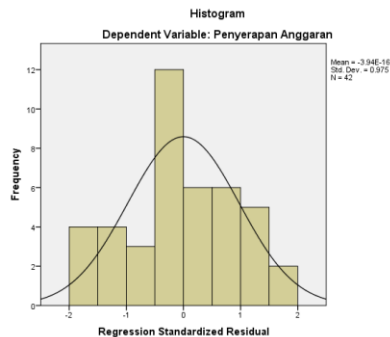


Sumber : Hasil olah data, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan angka Cronbach's Alpha pada kolom 3 variable tersebut lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil analisis grafik terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

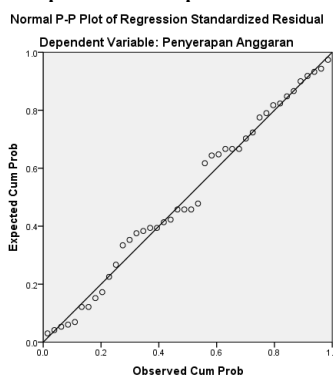


**Gambar 1. Histogram**

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa histogram menunjukkan pola terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari pola kurva yang tidak menceng ke kiri ataupun menceng ke kanan sehingga dapat disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola terdistribusi secara normal.

Melalui analisis grafik, dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini sudah berdistribusi normal. Hal itu dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal, dimana penyebaran titik-titik data tidak ada yang menjauh dari garis diagonal. Untuk lebih jelasnya grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot**

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Untuk memastikan apakah penyebaran data di sekitar garis diagonal berdistribusi normal, peneliti juga menggunakan uji normalitas data dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov (K-S), dengan ketentuan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05, data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.8 Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.66118855
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.070
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

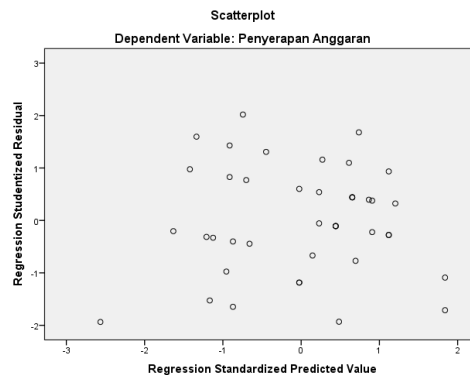
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.8 menunjukkan probabilitas (Asymp sig) = 0,20 > 0,05. Dengan demikian, data pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot daiam penelitian ini dibantu dengan SPSS 23 dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)**

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan gambar 3 antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tol dan nilai VIF. Data dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai Tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ .

**Tabel 7 Tolerance dan Nilai Variance Inflation Faktor**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.884	5.416		3.856	.000		

Pengetahuan Peraturan	.087	.149	.090	.580	.565	1.000	1.000
Lingkungan Birokrasi	.191	.133	.222	1.429	.161	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Dari data tabel 8 Uji Statistik t diperoleh persamaan hasil regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.884	5.416		3.856	.000
Pengetahuan Peraturan	.087	.149	.090	.580	.565
Lingkungan Birokrasi	.191	.133	.222	1.429	.161

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Hasil regresi berganda yang peneliti lakukan dalam variabel Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) dan Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ ) diketahui nilainya dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + c$$

$$\text{Nilai } Y = 20,884 + 0,087 + 0,191$$

1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) secara parsial Terhadap Penyerapan Anggaran ( $Y$ )  
Nilai koefisien regresi Pengetahuan Peraturan  $X_1$  terhadap Penyerapan Anggaran adalah sebesar 0,087 (8,7%) berarti Pengetahuan Peraturan  $X_1$  mempunyai hubungan terhadap Penyerapan Anggaran  $Y$  sebesar 8,7%, artinya jika ada peningkatan pengetahuan peraturan  $X_1$  sebesar 100% maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran untuk mewujudkan Good Governance sebesar 8,7% , begitu juga sebaliknya jika penurunan pengetahuan peraturan  $X_1$  sebesar 100% maka akan menurunkan Penyerapan Anggaran  $Y$  sebesar 8,7%. Jadi pengetahuan peraturan berhubungan positif secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil ini diperjelas tentang pentingnya pengetahuan peraturan bagi pegawai dalam pemerintahan daerah, semakin baik tingkat pengetahuan peraturan pegawai terhadap pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam suatu organisasi maka akan semakin baik penyerapan anggaran. Hasil ini juga dilihat dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan, dimana jawaban responden yang menunjukkan setuju tentang berbagai prosedur hukum yang harus di patuhi hingga menyajikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

2. Pengaruh Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) secara parsial Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)  
 Nilai koefisien regresi Lingkungan Birokrasi  $X_2$  terhadap Penyerapan Anggaran adalah sebesar 0,191 (19,1%) berarti Lingkungan Birokrasi  $X_2$  mempunyai hubungan terhadap Penyerapan Anggaran Y sebesar 19,1%, artinya jika ada peningkatan Lingkungan Birokrasi  $X_2$  sebesar 100% maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran untuk mewujudkan Good Governance sebesar 19,1% , begitu juga sebaliknya jika penurunan Lingkungan Birokrasi  $X_2$  sebesar 100% maka akan menurunkan Penyerapan Anggaran Y sebesar 19,1%. Jadi Lingkungan Birokrasi berhubungan positif secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil ini diperjelas tentang pentingnya Lingkungan Birokrasi bagi pegawai dalam pemerintahan daerah, semakin baik Lingkungan Birokrasi dalam suatu organisasi maka akan semakin baik penyerapan anggaran. Hasil ini juga dilihat dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan, dimana jawaban responden yang menunjukkan setuju tentang berbagai prosedur hukum yang harus dipatuhi dalam lingkungan birokrasi agar menghasilkan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Uji t

Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikansi  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  (Imam, 2011: 99) dengan ketentuan sebagai berikut:

- $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  untuk  $\alpha = 0.05$
- $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  untuk  $\alpha = 0,05$

Untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) dan Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) terhadap Penyerapan Anggaran (Y), Maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel 9.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.884	5.416		3.856	.000		
Pengetahuan Peraturan	.087	.149	.090	.580	.565	1.000	1.000
Lingkungan Birokrasi	.191	.133	.222	1.429	.161	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) sebesar 0,580 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 (5%) serta  $df = n-k-1$  ( $42-3-1$ ) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak karena nilai  $t_{hitung}$  0,580 <  $t_{tabel}$  1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya  $H_0$  dan ditolaknya  $H_a$  serta nilai signifikansi  $X_1$  sebesar 0,565. Karena nilai  $T_{sig} >$  dari 0,05 = 0,565 > 0,05.

Selain itu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) sebesar 1,429 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 (5%) serta  $df = n-k-1$  ( $42-3-1$ ) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak karena nilai  $t_{hitung}$  1,429 <  $t_{tabel}$  1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel

Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya  $H_0$  dan ditolaknya  $H_a$  serta nilai signifikansi  $X_2$  sebesar 0,161. Karena nilai  $T_{sig} > 0,05 = 0,161 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan birokrasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Hal ini berarti baik buruknya lingkungan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel lingkungan birokrasi tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

### **Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square )**

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square. R Square dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

**Tabel 10**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.239 <sup>a</sup>	.057	.009	1.70325

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Pengetahuan Peraturan  
 b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diperoleh nilai R Square 0.057 atau 5,7%. Hasil ini berarti 5,7% variabel Pengetahuan Peraturan ( $X_1$ ) dan Lingkungan Birokrasi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sedangkan sisanya 94,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. Besarnya kontribusi pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil uji regresi linear berganda adalah sebesar 0,087 (8,7%) dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dengan besarnya kontribusi lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil uji regresi linear berganda adalah sebesar 0,191 (19,1%).

## **REFERENSI**

- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Cindy Darsana Putri. 2017. Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (Studi pada Desa Se-Kabupaten Karangasem). Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.

- Haryani et al. 2011. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja: Transparansi Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Harhinto, Teguh. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Koeswoyo, Freddy. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pemakai Software Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pemakai Software Akuntansi K-System di Pulau Jawa). Tesis Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Miftah Toha. (2007). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Mas'ud Said. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
- Mudrajad Kuncoro, (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Nyoman, I Sumaryadi. 2010. Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Egrinaen Mauliziska Nugraheni, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Skripsi, Universitas Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 01/PB/2005 tentang Jurnal Standar. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Putri, Carlin Tasya and Fachruzzaman, Fachruzzaman, (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Riska Pratiwi. 2012. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta
- Suyatmin, dkk. 2008. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Lingkungan Kerja Akuntan Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7 (2) September.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang. Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyudi, 2009. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.